Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2623-1611*
Volume 7 Nomor 2 Halaman 51-57 April 2022 *e-ISSN 2623-1980*

KONDISI EKONOMI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANJAR

Jamaluddin[1*], Suriansyah Umar[2], Haitami[3]
[1,2,3,] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat, JL B Hasan Basri Kayutangi Banjarmasin, Indonesia
*Penulis korespondensi: jamaluddin@unlam.ac.id

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi dan relevansinya dengan implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring di Sekolah Menengah Atas (SMA) serta bagaimana implementasi kebijakan daring itu dilihat dari aspek aspek komunikasi, sumber daya ekonomi masyarakat atau kondisi ekonomi masyarakat, kecenderungan kecenderungan atau tingkah laku masyarakat dan implementator serta birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami dan merepresentasikan fenomena fenomena di sekitar kegiatan belajar-mengajar sekolah menengah atas di Kabupaten Banjar yang dipilih berdasarkan kategori Negeri dan Swasta masing masing satu sekolah. Sekolah yang dipilih yakni Sekolah Menengah Atas 2 Martapura dan Sekolah Menengah Atas Darul Hijrah Cindai Alus Kabupaten Banjar. Berdasarkan analisis dari hasil uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi ekonomi dan implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di SMA Kabupaten Banjar dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Di SMA 2 Martapura, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terkait erat dengan kondisi ekonomi siswa dan wali siswa karena kebutuhan membeli kuota, hp dan permasalahan jaringan internet cukup mempengaruhi pendapatan orangtua. Sementara di SMA Darul Hijrah Putera yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat, kondisi ekonomi siswa tidak berpengaruh signifikan dalam proses pembelajaran.

Kata kunci: kondisi ekonomi, implementasi kebijakan, pembelajaran jarak jauh, pandemi, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Banjar telah berupaya membuat kebijakan agar penyebaran virus Covid-19 tidak berkembang dengan pesat. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banjar, yang disahkan sejak 18 Mei 2020 mewajibkan untuk melakukan penghentian aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, memastikan tempat kerja selalu bersih dan higienis, selalu mencuci tangan dengan sabun, menyediakan vitamin guna meningkatkan imunitas karyawan, melakukan desinfeksi secara berkala, melakukan pengecekan suhu, harus menggunakan masker, dan masih banyak kebijakan lain guna mencegah virus Covid-19 (Hanida, 2020).

Bahaya virus ini mengharuskan semua pihak mewaspadai tempat tempat berkumpulnya banyak orang, termasuk bagi generasi muda, seperti di Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi salah satu tempat generasi muda yang rentan penularan virus corona. Dikarenakan sekolah sering menjadi tempat berkumpulnya para murid.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan edaran Nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Kemudian keluar juga kebijakan nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Daring atau pembelajaran jarak jauh, sehingga para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran Daring (Dalam Jaringan atau Pembelajaran Jarak Jauh merupakan suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi (Prawiyogi et al, 2020). Kebijakan Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini perlu dilaksanakan atau seringkali dikenal dengan istilah diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan, dan perlu disadari bahwa program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan pencapaian tujuan yang diinginkan

Di Kabupaten Banjar, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar menggunakan sistem dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring), dalam melakukan proses belajar mengajar kepada siswa. Dua sistem ini sebut Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Maidi Armansyah “menyesuaikan kondisi tempat dan kemampuan siswa menerima pelajaran (Koran Banjar.net). Untuk pembelajaran di sekolah maupun luring, siapkan dulu sarana

© Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

dan prasarana, cek kesiapan sekolah. Minta persetujuan orang tua dan aparat setempat. Karena ada daerah dinyatakan zona merah, ada desa tangguh. Koordinasikan sekolah dan desa. Kami juga ini masih mengkaji izin dari Gugus Tugas (Koranbanjar.net 2021).

Berdasarkan fakta ini, di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pembelajaran Jarak Jauh, sehingga menarik untuk diteliti beberapa hambatan pelaksanaannya, termasuk dalam kontek kondisi ekonomi masyarakatnya, atau jika menggunakan penjelasan kepala dinas adalah "menyesuaikan kondisi tempat dan kemampuan siswa menerima pelajaran". Karena itulah maka penelitian ini penting dilakukan terutama pada sekolah menengah atas (SMA) dimana para muridnya sudah banyak yang memiliki sarana komunikasi berupa handphone.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami dan merepresentasikan fenomena fenomena di sekitar kegiatan belajar-mengajar sekolah menengah atas di Kabupaten Banjar yang dipilih berdasarkan kategori Negeri dan Swasta masing masing satu sekolah. Penelitian ini berupaya memahami fenomena pembelajaran jarak jauh (daring-dalam jaringan) dari perspektif para partisipan melalui pelibatan ke dalam kehidupan aktor aktor yang terlibat pada pembelajaran tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah- masalah yang diteliti. Menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19 di Sekolah Menengah Atas 2 Martapura dan Sekolah Menengah Atas Darul Hijrah Cindai Alus Kabupaten Banjar.

Dalam upaya memperoleh data dan informasi yang akurat maka informan penelitian tentang "Kondisi Ekonomi dan Implementasi Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Era Pandemi Covid-19" ini sebagai berikut:

a. Eddy Rachman Kasubag Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar
b. Saryono Kepala Sekolah SMAN 2 Martapura
c. Muhidin Staf Tata Usaha SMA Darul Hijrah Cindai Alus Banjar
d. Harnida Restutiani, guru matematika SMAN 2 Martapura
e. Hammy Dummajid, koordinator BK SMAN 2 Martapura
f. Nidya Hairunnisa, guru seni budaya SMAN 2 Martapura
g. Siti Aisyah, Guru BK SMAN 2 Martapura
h. 34 Siswa dan Siswi SMAN 2 Martapura
i. 4 Orang Guru SMA Darul Hijrah Putera
j. 10 Siswa MIA 2 SMA Darul Hijrah Putera

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Banjar menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dilaksanakan dengan diatur tersendiri oleh pemerintah daerah dan dinas Pendidikan Provinsi Melalui surat edaran berkala sesuai ketetapan dari Pemerintah Provinsi. Dengan kata lain, kewenangan untuk mengakhiri Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi COVID-19 berlangsung diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) setempat, sekolah, dan orangtua. Sehingga ketiga komponen inilah yang menjadi kunci diselenggarakannya pembelajaran tatap muka atau tidak (Sonora, 2020).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan rupanya masih tetap mempertahankan belajar daring hingga penyebaran CoVID-19 benar-benar dapat dikendalikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf Effendi, mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang menjadi acuan pembelajaran tatap muka, tidak mewajibkan seluruh daerah untuk kembali membuka sekolah (Pemerintah Provinsi Kalsel, 2020).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum bisa memberikan lampu hijau terkait sistem pembelajaran tatap muka di sekolah. Meskipun, sejumlah kelurahan di beberapa titik di Kabupaten/Kota telah terbebas dari virus Corona atau COVID-19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan, Muhammad Yusuf Effendi mengatakan, hal ini merujuk belum didapatkannya instruksi dari Gubernur Kalimantan Selatan serta keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Sesuai ketentuan

yang diberlakukan, hingga kini pihaknya pun masih belum bisa mengizinkan seluruh sekolah yang ada di Kalimantan Selatan untuk melakukan aktivitas proses belajar mengajar secara tatap muka (Pemerintah Provinsi Kalsel, 2020).

Implementasi kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Kabupaten banjar diatur bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sambil terus memantau perkembangan terkini di masing-masing wilayah. Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal ini Kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk SMA/MA diatur spesifik oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten mengurus kegiatan PJJ untuk SMP ke bawah. Hal ini sudah dikonfirmasi di sekolah juga sama yakni Pengaturan terkait permasalah pembelajaran jarak jauh untuk SMA N Martapura diatur oleh dinas pendidikan Provinsi. Melalui edaran yang diberikan secara berkala menyesuaikan kondisi pandemi. Baru kemudian pihak sekolah membuat edaran lanjutan yang diberikan kepada guru-guru, siswa dan juga para orangtua siswa.

Penyesuaian kebijakan pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Banjar bersandar pada aturan SKB 4 Menteri yakni Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Dari dinas pendidikan provinsi Kalimantan Selatan juga secara berkala mengeluarkan edaran terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Edaran tersebut menyesuaikan dengan keadaan pandemi di tingkat wilayah masing-masing. Dalam beberapa edaran yang diberikan dinas Provinsi diterapkan pembelajaran Jarak Jauh dengan instruksi untuk memberi tugas kepada siswa yang diwakili oleh orangtua siswa dengan cara mengambil langsung tugas tersebut ke sekolah.

Pembelajaran daring juga disebutkan di dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Pada masa pandemi ini, pembelajaran di sekolah dialihkan dengan belajar dari rumah atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sebenarnya bukan suatu hal yang asing dalam konsep pendidikan melalui online (e-learning). Namun, mendapat perhatian khusus ketika metode itu harus diterapkan pada setiap jenjang pendidikan karena PJJ dilakukan serentak ini adalah hal baru bagi dunia pendidikan Indonesia (Hidayah, 2020). Pemerintah menganjurkan seluruh siswa untuk belajar di rumah, dengan pengawasan orang tua. Siswa Siswa melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode yang sudah dibuat oleh sekolah masing masing. Biasanya kegiatan yang mengacu pada perilaku, sikap dan moral anak harus dilaporkan oleh orang tua setiap harinya melalui video atau foto (Contesa, 2020).

Menariknya para orangtua siswa lebih menyukai kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM). Kondisi ini dikarenakan orang tua mengalami kesulitan dalam memberikan asistensi pembelajaran kepada anak-anak mereka ketika dirumah. Selain itu, beberapa orangtua yang kesulitan dalam menggunakan *device* pembelajaran termasuk menggunakan HP Android juga lebih menyukai pembelajaran tatap muka secara langsung. Belum lagi, faktor mereka juga harus bekerja dan mencari penghasilan masih dibebani mengurus pembelajaran anak secara daring. Selain karena desakan pihak orangtua siswa, pembelajaran tatap muka juga diharapkan bisa membantu memonitor kesehatan anak setiap hari. Karena disekolah siswa selalu diukur suhu tubuh dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Justru dengan kebijakan tersebut, kesehatan dan penyebaran Virus Covid 19 bisa dikontrol. Jadi kegiatan pembelajaran tatap muka pada semester yang akan datang sudah mendapatkan persetujuan dari orangtua siswa.

Dari sebagian besar sekolah yang melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), SMAN 2 Martapura memiliki beberapa kebijakan penyesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Hal ini dinyatakan sebagai upaya untuk membuat regulasi yang dalam mendukung program belajar di rumah. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kepala sekolah membuat edaran yang merupakan tindak lanjut dari edaran Dinas Pendidikan Provinsi terkait pembelajaran Jarak Jauh. Edaran tersebut diberikan kepada guru, siswa dan orangtua siswa. Sehingga diharapkan edaran terkait PJJ bisa menjadi sarana sosialisasi terkait kebijakan pembelajaran daring.
2. Para guru mapel kemudian memberikan Gform (Google Form) yang disebar kepada seluruh siswa untuk mendata bagaimana teknis pembelajaran jarak jauh, cara pengumpulan tugas dan permasalahan administratif akademik lainnya.
3. Tahapan selanjutnya kepala sekolah kemudian memantau kembali pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut dengan mengecek jurnal mengajar para guru.
4. Apabila ditemukan beberapa masalah terkait kendala dan kesulitan yang dihadapi siswa maka kepala sekolah menugaskan para guru bimbingan konseling untuk melakukan kroscek kesulitan siswa dengan melakukan kontak kepada orangtua siswa dan siswa.

5. Apabila jawaban yang diterima terkait kesulitan pembelajaran dibutuhkan langkah lebih lanjut maka dilakukan home visit untuk mengecek kondisi siswa.
6. Home visit ini merupakan kebijakan dari SMAN 2 Martapura untuk melakukan kunjungan rumah bagi siswa yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh. Home visit merupakan kegiatan mencari solusi terkait permasalah siswa, dalam beberapa kali kunjungan home visit permasalahan dan kendala siswa dalam pembelajaran daring cukup beragam dari permasalahan akademik, teknis, kuota, jaringan, *device*, dan permasalahan psikologi (motivasi) dan kondisi ekonomi.
7. Setelah diketahui permasalahan siswa dalam pelaksanaan home visit penyelesaian masalah pun juga harus menyesuaikan dengan permasalahannya. Kepala sekolah kemudian juga menerapkan kebijakan peminjaman 250 Tab kepada siswa yang terkendala dalam kesulitan HP dalam perkuliahan jarak jauh. Selain itu sekolah menerapkan kebijakan untuk menyisihkan dana BOS untuk pemberian kuota siswa sebesar 50.000 setiap bulan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Kebijakan lanjutannya sekolah juga melaporkan beberapa permasalahan tersebut kepada dinas pendidikan provinsi untuk dicarikan bersama-sama proses penyelesaiannya.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sekolah telah menetapkan regulasi sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dukungan dari pihak-pihak terkait program belajar jarak jauh sangat diperlukan, ketika sekolah diminta bertanggung jawab pada tingkat standar tertinggi, kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk keberhasilan sekolah, manajemen krisis juga diperlukan agar siswa bisa terus melanjutkan pendidikan di tengah kondisi ekonomi dan sosial yang semakin sulit akibat pandemi Covid 19. Selain itu, secara umum SMAN 2 Martapura telah melakukan penyesuaian alokasi anggaran melalui dana BOS dalam mendukung proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menyediakan kuota gratis bagi siswa tidak mampu. Dukungan fasilitas dan infrastruktur yang diberikan SMAN 2 Martapura melalui penyediaan 250 Tablet Tab dan kuota gratis @50ribu perbulan merupakan bentuk dukungan yang diberikan dalam melakukan proses pembelajaran dari rumah.

Sementara dalam kasus SMA Darul Hijrah Putera, pondok pesantren juga terkena dampak dari pandemi Covid-19. Imbauan serta berbagai kebijakan pemerintah terkait pebelajaran pada masa pandemi turut dilaksanakan oleh lembaga pesantren. Sejak bulan Maret 2020 pesantren menghentikan sementara segala aktivitas pembelajaran dan memulangkan santri-santrinya. Kegiatan pembelajaran maupun mengaji dilakukan di rumah masing-masing. Hal tersebut berjalan sampai pemerintah memberlakukan sebuah tatanan baru atau era kernormalan baru yang disebut juga dengan *new normal* pada pertengahan tahun 2020. Pada bulan Juli 2020 beberapa pondok pesantren di Kabupaten Banjar mulai menerapkan pembelajaran tatap muka. Salah satu pesantren yang sudah memberlakukan pembelajaran langsung adalah Pondok Pesantren Darul Hijrah. Diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka di pesantren tentu harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat

Adapun kedatangan santri dilakukan secara bertahap dengan melakukan karantina mandiri terlebih dahulu yang sudah disiapkan dari pondok pesantren dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pada saat pembelajaran tatap muka diberlakukan salah satu protokol kesehatan yang diterapakan salah satunya mengurangi kapasitas jumlah orang didalam kelas serta mempersingkat waktu pelajaran. Selain itu para murid harus menggunakan masker serta mencuci tangan sebelum memasuki ruangan kelas. Pihak pondok juga mensosialisasisakan terkait pembelajaran tatap muka kepada orang tua melalui telepon maupun surat edaran yang dikeluarakan yang mana pada saat kembali ke pondok pesantren para santri harus dikarantina terlebih dahulu. Dalam hal ini pondok pesantren sudah menyiapkan segala aspek untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka saat pandemi belum berkahir sebab pendidikan di lingkungan pesantren merupakan pendidikan keagamaan dengan sistem asmara yang mana para santri hidup dengan pola interaksi yang berlangsung secara terus-menerus.

Struktur birokrasi dari pihak pondok pesantren kepada para santri dan orang tua santri diterapkan melalu berbagai kebijakan. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka berlangsung pihak pondok pesantren juga membentuk sebuah tim satuan tugas dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pondok pesantren. Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang ketata di SMA Darul Hijrah dengan pelaksanaan lockdown lokal ternyata mampu meminimalisir dampak penyebaran pandemi.Berdasarkan analisis dari hasil uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi ekonomi dan implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh di SMA Kabupaten Banjar dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Di SMA 2 Martapura, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terkait erat dengan kondisi ekonomi siswa dan wali siswa karena kebutuhan membeli kuota, hp dan peramsalahan jaringan internet cukup

mempengaruhi pendapatan orangtua. Sementara di SMA Darul Hijrah Putera yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan protokolo kesehatan yang ketat, kondisi ekonomi siswa tidak berpengaruh signifikan dalam proses pembelajaran.

Hal yang berbeda terjadi untuk sekolah yang menerapkan pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh tersebut pola hubungan yang terjalin antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dengan badan pelaksana seperti tim satuan gugus tugas percepatan dan penanganan Covid-19 Provinsi dan Kabupaten, Gubernur dan Bupati, serta kepala sekolah salah satunya melalui koordinasi yang dilakukan melalui rapat mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa aspek karakteristik badan-badan pelaksana juga berpengaruh terhadap pengimplementasian kebijakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjar

Dalam implementasi pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Banjar, menarik melihat pola birokrasi yang terjadi tidak hanya pada level pemerintah daerah namun juga kepada sekolah-sekolah. Selain pola birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada sekolah dengan memberikan pelatihan guna tercipta pola pembelajaran yang efisien dan inovatif. Struktur birokrasi dari pihak sekolah juga kepada siswa dan orangtua siswa diterapkan melalui berbagai kebijakan. Dalam beberapa kesempatan para guru di SMAN 2 Martapura melakukan pengecekan secara berkala melalui kebijakan home visit yang diatur oleh sekolah.

Pihak pemerintah daerah selain memberikan edaran berkala juga melakukan pelatihan pelatihan guna mendukung pembelajaran inovatif yang dilakukan.Salah satunya dengan ketersediaan sarana. Yang perlu dipersiapkan untuk menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh yaitu perangkat keras yang berupa handphone atau laptop, serta kuota internet yang dapat menunjang proses kegiatan pembelajaran jarak jauh agar dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Purwanto et al., (2020:5) yang menyebutkan fasilitas sangat penting untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar, untuk pembelajaran online di rumah seharusnya sudah disiapkan dulu fasilitasnya seperti laptop, komputer maupun handphone yang nantinya dapat mempermudah siswa dalam menyimak proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran jarak jauh dinilai dapat berjalan dengan maksimal apabila fasilitas sudah memadai dan tersedia, pembelajaran jarak jauh di SMA 2 Martapura dan SMA Darul Hijrah Kabupaten Banjar dapat terlaksana karena setiap keluarga siswa memiliki perangkat yang dapat mendukung kegiatan PJJ.

Strategi yang sudah digunakan dalam pembelajaran jarak jauh guru menggunakan pendekatan dengan cara berkomunikasi personal dengan siswa dan bekerjasama dengan orang tua dalam pengkondisian ketika sedang belajar. Hal ini sebagian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawiyogi et all (2020) yang menyatakan selama pembelajaran jarak jauh guru melakukan komunikasi secara pribadi dengan siswa untuk memastikan bahwa mereka mampu memahami materi yang telah disampaikan, mengumpulkan tugas tepat waktu dan memberikan feedback tentan materi pelajaran. Komunikasi dengan orang tua dilakukan sebagai cara pemberian pendampingan untuk menginformasikan materi dan tugas yang disampaikan kepada siswa (Sonora, 2021).

Bentuk dari koordinasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan ciri-ciri badan atau dinas yang memegang wewenang dari Pemerintah Kabupaten Banjar menurut peneliti terorganisir, koordinasi birokrasi antara dinas atau badan sudah cukup jelas. Pihak sekolah juga melalui Kebijakan kepala sekolah menerapkan pola birokrasi yang tersistematis dengan pemantau berkala kepada jurnal pembelajaran guru, setelah ditemukan permasalahan maka kepala sekolah kemudian mengutus Guru BK untuk melakukan home visit dan tindakan lanjutan dalam proses penyelesain masalahnya.

4. SIMPULAN

Di SMA Darul Hijrah Putera yang melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat, kondisi ekonomi siswa tidak berpengaruh signifikan dalam proses pembelajaran. Karena tidak ada kebutuhan tambahan dalam kelengkapan pembelajaran jarak juah. Semua fasilitas sudah diberikan oleh sekolah. Sementara di SMA 2 Martapura, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terkait erat dengan kondisi ekonomi siswa dan wali siswa karena kebutuhan membeli kuota, hp dan permasalahan jaringan internet yang cukup mempengaruhi pendapatan orangtua.

Dalam mengukur bagaimana implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh tersebut dalam relevansinya dengan kondisi ekonomi ditetapkan 4 komponen utama menurut George C. Edward III. Komponen berpengaruh

terhadap komitmen atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan sikap masyarakat serta implementator dan struktur birokrasi.

Dalam faktor komunikasi Pihak sekolah SMAN 2 Martapura selalu melibatkan komunikasi dan partisipasi orang tua dalam proses pendidikan anak karena orang tua memiliki peran penting dan utama dalam pendidikan anaknya. Oleh karena itu, partisipasi orang tua dalam pendidikan anak merupakan berbagai kegiatan bersama yang dilakukan oleh orang tua dan guru di rumah dan sekolah dengan tujuan untuk memaksimalkan perkembangan dan kesejahteraan pendidikan anak di sekolah.

Dalam aspek sumber daya *(resource*) khususnya sumber daya ekonomi, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa pada kondisi sosial dalam hal ini masyarakat atau orang tua siswa turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Beberapa orang tua mengalami kondisi ekonominya yang terdampak oleh pandemi Covid-19 terlebih lagi anak-anak mereka yang masih sekolah saat pandemi Covid-19 melanda. Tentunya orang tua harus menyediakan kebutuhan anaknya dalam pembelajaran jarak jauh ini saat di rumah. Hal tersebut bisa berupa perangkat elektronik seperti telepon pintar maupun laptop. Selain itu, apabila di rumah siswa tersebut tidak memiliki jaringan Wi-Fi tentu orang tua harus menyediakan kuota internet bagi anaknya yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini.

Dalam aspek disposisi dan sikap, berdasarkan temuan lapangan yang didapat peneliti berkaitan dengan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh telah terbilang cukup baik. Artinya, dalam hal ini para pelaksana menerima dengan baik adanya kebijakan tersebut, tidak ada penolakan dari para pelaksana maupun dari masyarakat.

Sementara dalam aspek struktur birokrasi, bentuk dari koordinasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan ciri-ciri badan atau dinas yang memegang wewenang dari Pemerintah Kabupaten Banjar menurut peneliti terorganisir, koordinasi birokrasi antara dinas atau badan sudah cukup jelas. Pihak sekolah juga melalui Kebijakan kepala sekolah menerapkan pola birokrasi yang tersistematis dengan pemantau berkala kepada jurnal pembelajaran guru, setelah ditemukan permasalahan maka kepala sekolah kemudian mengutus Guru BK untuk melakukan home visit dan tindakan lanjutan dalam proses penyelesain masalahnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terealisasinya penelitian ini, antara lain kepada Universitas Lambung Mangkurat sebagai penyandang dana penelitian melalui Kontrak Penelitian Nomor 009.33/UN8.2/PL/2021. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel (Dinas Pendidikan), Pemerintah Kabupaten Banjar (Dinas Pendidikan), dan SMA 2 Martapura, SMA Darul Hijrah Putera dan Pondok Modern Darul Hijrah Putera.

6. DAFTAR PUSTAKA

Contesa, D. (2019) "Hubungan Orang Tua Dengan Minat Belajar Siswa Pada Masa Covid-19," n.d. https://mahasiswaindonesia.id/hubungan-orang-tua-dengan-minat-belajar-siswa-pada-masa-covid-19/

Hidayah, N. (2020). "*Tantangan Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Di Era Pandemi COVID 19." Majelis Pendidikan Aceh* 14, no. 2

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, Tentang Novel Coronavirus [online]. Tersedia : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemkes.go.id)

Koran Banjar. (2021). Pembelajaran Jarak Jauh, Komisi I; Demi Keselamatan Jiwa Generasi Penerus. Diakses dari https://koranbanjar.net/pembelajaran-jarak-jauh-komisi-i-demi-keselamatan-jiwa-generasi-penerus/.

Pemerintah Kabupaten Banjar, 2020, Sebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Banjar [online]. Tersedia : https://banjarkab.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalsel. (2021) Disdikbud Kalsel : Belum Ada Instruksi, Sekolah Tatap Muka Belum Berlakukan. Diakses dari https://kalselprov.go.id/berita/eyJpdiI6Im1LcVNnaE1lbW55ZnEzR2lRVVRDVnc9PSIsInZhbHVlIjoienhUanVFbzBqdUxUZ3VHdU5kNGRkUT09IiwibWFjIjoiMjlhYzU2MmQ3ZjliZDIwZjE4ZjdhNjYwMDZhYjM0YWM3MDRmNzg3Mzk2YmI4YTlmYzQ1MDk5NWRiMjlkYzczYyJ9 pada 20 September 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Prawiyogi, A. G., Purwanugraha, A., Fakhry, G., & Firmansyah, M. (2020). Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Pembelajaran Siswa di SDIT Cendekia Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *11*(1), 94-101.

Purwanto, E. A, & Sulistyastuti. D.R (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep.* . Bandung. Refika Aditama.

Sonora. (2021). Nadiem Bolehkan Sekolah Ttap Muka, DISDIKBUD Kalsel Tunggu Covid 19 Terkendali. Diakses dari https://www.sonora.id/read/422445135/nadiem-bolehkan-sekolah-tatap-muka-disdikbud-kalsel-tunggu-covid-19-terkendali. Diakses pada 20 September 2021.